

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan adalah proses yang paling awal dan menentukan langkah menuju sasaran dari ketercapaian suatu tujuan. Sesuai dengan isi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa dalam setiap langkah gerak, manusia harus introspeksi memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki rencana, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak terjerumus ke lubang yang sama". Hal tersebut dijelaskan dalam Surat Al-Hasyr, ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Surat Al-Hasyr, ayat 18)¹

Era reformasi telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam berbagai kehidupan, termasuk kehidupan pendidikan. Salah satu perubahan mendasar adalah manajemen negara, yaitu dari manajemen berbasis pusat menjadi manajemen berbasis daerah. Secara resmi, perubahan ini telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999, yang kemudian direvisi dan disempurnakan mejadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pedoman pelaksanaannya pun telah dibuat melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

¹ Dep. Agama RI., *Al-quran dan terjemah*, Jakarta: Dep. Agama RI, 2000, Hal.994.

Konsekuensi logis dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah manajemen pendidikan harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Hal tersebut antara lain terwujud dalam bentuk perubahan arah paradigma pendidikan, dari paradigma lama ke paradigma baru, yang tentu juga berdampak pada paradigma perencanaan pendidikannya. Secara ideal, paradigma baru pendidikan tersebut mestinya mewarnai kebijakan pendidikan, baik kebijakan pendidikan yang bersifat substantif maupun implementatif. Seperti yang dinyatakan oleh Azyumardi Azra bahwa dengan era otonomi daerah: “lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, madrasah, pesantren, universitas (perguruan tinggi), dan lainnya yang terintegrasi dalam pendidikan nasional- haruslah melakukan reorientasi, rekonstruksi kritis, restrukturisasi, dan reposisi, serta berusaha untuk menerapkan paradigma baru pendidikan nasional”. Selain itu implementasi kebijakan tersebut diharapkan berdampak positif terhadap kemajuan pendidikan di daerah dan di tingkat satuan pendidikan.²

Saat ini, banyak terdapat proyek-proyek perencanaan yang menerima bantuan dari federal (pemerintah pusat) dengan harus menyertakan rencana pendidikan jangka panjang. Akibatnya, dewan sekolah diminta lebih sering menghubungkan perencanaan-perencanaan pendidikan dengan perencanaan daerah sekitarnya secara menyeluruh. Lokasi fasilitas-fasilitas sekolah baru harus berhubungan dengan proyeksi populasi dan perkembangan kawasan pemukiman.³

Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapkan kepada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.⁴

² Sabrini, Neneng Lina, *Perencanaan Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hal.. 279-280

³ Udin Syaefudin Saud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hal. 58

⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000), Hal. 78

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana.⁵

Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawabannya. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut.⁶

Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) mencerminkan kekuatan madrasah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya dan sekaligus menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga para siswa. RAPBM terdiri atas rencana *pendapatan* dan rencana *pengeluaran* atau belanja madrasah. Dalam rencana pendapatan, terdapat komponen sumber dana yang berasal dari pemerintah, siswa (terutama dari iuran rutin madrasah, atau lazim disebut “iuran BP3”), dan sumbangan

⁵ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, Hal. 47-48

⁶ E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, Hal. 193-194

masyarakat lainnya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sementara itu untuk pengeluaran terdapat komponen gaji guru (pegawai) yang biasanya paling dominan dan non-gaji (pemeliharaan, pengadaan sarana penunjang seperti alat peraga, penyelenggaraan proses belajar-mengajar, dan kegiatan ekstra-kurikuler).⁷

Berkaitan dengan biaya pendidikan, menurut Ace Suryadi terdapat agenda kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius, yaitu:

1. Besarnya anggaran pendidikan yang di alokasikan (*revenue*).
2. Aspek keadilan dalam alokasi anggaran.
3. Aspek efisiensi dalam pendayagunaan anggaran, dan
4. Anggaran pendidikan dan desentralisasi pengelolaan.⁸

Anggaran yang menjadi kalkulasi pembiayaan pendidikan menjadi salah satu nyawa yang menentukan dinamika pendidikan. Kalau hal ini dapat ditata rapi dan akuntabel, maka aspek yang lain akan mudah terealisasi dengan baik. Pengawasan secara ketat dan serius terhadap aspek ini sangat penting dilakukan mengingat mudahnya manusia terjerembab dalam godaan nafsu dan lingkungan menuju kehidupan yang sesat.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah yang menitik beratkan pada implementasi dalam merancang sebuah strategi. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti memberikan judul: **"Implementasi Strategi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah di MI Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati Tahun 2014/2015"**.

⁷ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003, Hal. 57

⁸ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi-otonomi Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 27

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Diva Press, Jogjakarta, 2012, Hal. 203

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu Implementasi Strategi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah.

Judul yang berkaitan dengan implementasi strategi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah ini masih sangatlah luas. Oleh karena itu, supaya pembahasan dalam penelitian ini bisa jelas dan terarah maka peneliti membatasi permasalahan penelitian pada perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah di MI Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati ini pada masalah perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek serta perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah.

C. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi strategi perencanaan jangka panjang di MI Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati?
2. Bagaimana implementasi strategi perencanaan jangka menengah di MI Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati?
3. Bagaimana implementasi strategi perencanaan jangka pendek di MI Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati?
4. Bagaimana implementasi strategi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah di MI Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang mendasari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi strategi perencanaan jangka panjang di MI Nurul Qur'an Tegalwero, Pucakwangi, Pati.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi perencanaan jangka menengah di MI Nurul Qur'an Tegalwero, Pucakwangi, Pati.

3. Untuk mengetahui implementasi strategi perencanaan jangka pendek di MI Nurul Qur'an Tegalwero, Pucakwangi, Pati.
4. Untuk mengetahui implementasi strategi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah di MI Nurul Qur'an Tegalwero, Pucakwangi, Pati.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga dan masukan secara akademis sehingga mampu menambah khazanah pengetahuan dibidang pendidikan khususnya implementasi strategi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja madrasah.

2. Manfaat praktis

Bagi *peneliti*, penelitian ini dapat menambah pengalaman, wawasan serta ilmu pengetahuan untuk memenuhi syarat akademik bagi peneliti untuk mencapai gelar sarjana.

Bagi *MI Nurul Qur'an Tegalwero Pucakwangi Pati*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai perencanaan anggaran dan juga untuk memperkaya khasanah ilmu bagi para pengelola madrasah.

Bagi *pendidik*, penelitian ini dapat menjadi sebuah renungan dan bahan pijakan untuk lebih mengetahui tatacara merencanakan anggaran pendapatan dan belanja madrasah yang dilaksanakan di madrasah.